

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA
AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

MOHAMMAD NUR SEPTIADY MASLOMAN NIT.

18273102

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

This research was conducted in Ploso Village, Pacitan District, Pacitan Regency with the aim of making an inventory of the physical and non-physical potentials that were prepared in the action plan for structuring access to agrarian reform to improve the welfare of the people in the area. In addition, the researcher estimates the impact that will occur from these activities and estimates the driving and inhibiting factors that influence it as well as the settlement strategy that will be taken.

This research was conducted using qualitative methods. Where the data obtained is based on the results of surveys, observations, interviews, and documentation which is then processed using descriptive analysis methods so that the resulting data can describe the entire potential of the existing village, both physical and non-physical potentials as well as other types of businesses that can be developed.

The results of the research that have been carried out then obtained various types of other businesses that can be developed, one of which is the development of organic fertilizer products by involving related agencies which are arranged in an action plan for community empowerment in the area.

Keywords: action plan, village potential, community empowerment

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Reforma Agraria	14
2. Penataan Aset	15
3. Penataan Akses	15
4. Potensi Wilayah Kelurahan	16
5. Kegiatan Usaha Berdasarkan Potensi Kelurahan	18
B. Landasan Teori	18
1. Teori Produksi	18
2. Teori Pasar	19
3. Teori <i>Break Even Point</i> (BEP)	23
4. Kesejahteraan Masyarakat	24
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Populasi, Sampel, dan Informan	32
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	33
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data	36
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	50

BAB V POTENSI WILAYAH DAN RENCANA AKSI.....	54
A. Potensi Wilayah Kelurahan.....	54
B. Rencana Aksi	69
BAB VI PERKIRAAN DAMPAK PELAKSANAAN RENCANA AKSI	78
BAB VII FAKTOR PENGHAMBAT DAN FAKTOR PENDORONG	
RENCANA AKSI	82
BAB VIII PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari (PAWONSARI) merupakan tiga Wilayah Jawa bagian selatan yang menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria sesuai dengan arahan Wakil Menteri ATR/BPN dalam kunjungannya ke wilayah tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan ketiga wilayah ini dinilai memiliki beragam potensi Sumber Daya Alam yang relatif memiliki banyak persamaan antara lain Biofarmaka, Kopi, Coklat, Kerajinan, Olahan Yang berasal dari ikan, dan juga dukungan wisata pantai maupun daratan yang sangat besar yang dapat di kembangkan untuk kesejahteraan masyarakatnya meskipun dalam segi geografisnya memang jauh lebih sulit dibandingkan dengan Jawa bagian Utara. Akan tetapi itu bisa menjadi tantangan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan kesejahteraan wilayah Kota dan Kelurahan di wilayah pulau jawa khususnya di wilayah PAWONSARI. Khususnya Kabupaten Pacitan, yang merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Propinsi Jawa Timur tersebut, memiliki sebagian besar luas tanah yang berbukit yaitu sekitar 85 persen dan sisanya merupakan daratan rendah yang letaknya berbatasan langsung dengan jajaran pantai yang didominasi beragam objek wisata yang di kelola oleh Pemerintah ataupun pihak swasta dengan melibatkan masyarakat sekitar.

Kerjasama di bidang ekonomi Pemerintah Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul (PAWONSARI) yang terbingkai dalam Pawonsari tujuannya tentu untuk menguntungkan semua pihak, utamanya pada percepatan pemasaran produk-produk Koperasi dan UKM. Diharapkan upaya peningkatan ekonomi melalui kerjasama ini dapat mendukung *Geo* Produksi untuk *Geopark* Gunung Sewu. Sejalan dengan peningkatan ekonomi tentunya, peningkatan kunjungan wisata di tiga Kabupaten ini diharapkan menjadi sebuah paket wisata di berbagai geosite

geopark gunung sewu yang masing-masing menyuguhkan nuansa dan pesona ketertarikan yang berbeda-beda. Selain pada Sumber Daya Alamnya, Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan misi Bupati Pacitan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan yang ada pada pelaku UMKM di tiga Kabupaten tersebut.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan tidak terlepas dari Pemerinta Daerah saja melainkan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ATR/BPN melalui program Reforma Agraria (RA) yang diharapkan mampu menjadi tombak terselanggaranya semua kebijakan di bidang pertanahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui distribusi asset dan akses. Dalam konteks distribusi akses contohnya, pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan lebih memfokuskan pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada untuk kemudian bisa di sinergikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adapun Program yang di maksud yaitu Gugus tugas Reforma Agraria (GTRA).

Seperti yang tertuang dalam (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78) bahwa potensi ekonomi kelurahan menjadi syarat pembangunan kelurahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan dan kualitas hidup manusia. Pembangunan kelurahan yang berorientasi kepada potensi dan sumber daya kelurahan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai parameter bagi kelurahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan potensi unggulan yang dimiliki oleh suatu kelurahan dapat berbeda dengan kelurahan lain karena setiap kelurahan memiliki keanekaragaman yang khas baik dari sisi ekonomi, budaya dan geografis. Dengan demikian mengenali potensi dan peran masyarakat dalam Pembangunan kelurahan dapat menjadi upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Dari penjelasan di atas kemudian membuat peneliti tertarik terhadap salah satu kelurahan yang akan di jadikan objek penyusunan Action Plan penataan Reforma Agraria berbasis potensi wiayah kelurahan dan analisis ekonominya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Secara Administrasi Kelurahan Ploso berbatasan :

1. Utara : Kelurahan Baleharjo
2. Selatan : Samudera Indonesia
3. Barat : Kelurahan Sidoharjo
4. Timur : Kelurahan Kembang

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta citra satelit dan data Kecamatan dalam angka tahun 2017-2021 peneliti melihat ada salah satu keunikan yang dimiliki oleh Kelurahan tersebut dibandingkan dengan Kelurahan/Kelurahan lain yang berada dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan dimana sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan sekitar 80% penduduknya menggatungkan pendapatannya dengan bertani. Disamping itu, di Kelurahan Ploso juga terdapat salah satu objek pariwisata pantai yang cukup terkenal yaitu pantai pancer door yang memiliki ombak besar dan sering dijadikan tempat berseluncur oleh wisatawan lokal maupun asing.

Setelah memperhatikan keberadaan Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dan sebagai langkah untuk menjawab tantangan Kabupaten Pacitan dalam bingkai reforma agraria dan juga sebagai upaya untuk mendorong percepatan dalam pemerataan ekonomi berbasis potensi wilayah kelurahan, maka judul yang di angkat yaitu “Penyusunan *Action Plan* Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan).”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah Kelurahan di Kelurahan Ploso?
- b. Bagaimana perkiraan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan di Kelurahan Ploso?
- c. Apa faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform dan bagaimana solusi menyelesaikan faktor penghambat dimaksud?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah Kelurahan di Kelurahan Ploso.
2. Memperkirakan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ploso.
3. Menginventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform di Kelurahan Ploso dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti di harapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang reforma agraria serta berkesempatan untuk lebih mendalami kebijakan-kebijakan apa saja yang seharusnya di ambil ketika menyusun rencana

aksi dalam penataan akses reform berdasarkan potensi kelurahan/kelurahan tersebut.

2. Bagi Dinas-dinas terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kelurahan Ploso, para pemilik sumberdaya, lebih khususnya para pelaku usaha UKM yang ada di Kelurahan Ploso, hasil penelitian ini dapat memperkaya data dan informasi mengenai keadaan fisik, sosial, ekonomi dan pertanahan masyarakat Kelurahan sehingga dapat dijadikan bahan referensi pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana usaha dan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan.
3. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan langkah konkrit apa saja yang akan di ambil ketika melaksanakan program reforma agraria berdasarkan potensi wilayah kelurahan/kelurahan;
4. Bagi masyarakat dan pemerintahan Kelurahan Ploso, peneliti berharap bisa dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kesejahteraan Kelurahan Ploso, serta dapat mengembangkan beragam potensi Kelurahan secara optimal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Dalam subbab keaslian penelitian ini diperbandingkan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain dalam hal (a) lokasi penelitian, (b) tahun penelitian, (c) judul penelitian, (d) tujuan penelitian, (e) metode penelitian, dan (f) hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilaksanakan ini terhadap penelitian-penelitian sejenis dimaksud untuk memenuhi kaidah keaslian dan kebaruan penelitian yang direncanakan ini. Keaslian dan kebaruan penelitian diharapkan dapat menjamin bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat baik bagi

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi perumusan kebijakan ke depan. Hasil perbandingan dimaksud disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan antara karakteristik penelitian ini dengan penelitian serupa terdahulu.

1.	Nama Peneliti	Ilham Arisaputra
	Tahun Penelitian	2016
	Judul & Lokasi Penelitian	<i>Access Reform</i> dalam kerangka reforma agraria untuk mewujudkan keadilan sosial
	Metode Penelitian	Metode penelitian hukum
	Permasalahan Penelitian	Sejauh mana gerakan reforma agraria dalam hal akses reform menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
	Hasil/Kesimpulan	Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Oleh karena itu selain dimaknai sebagai land reform, dan access reform, Iham juga berpendapat bahwa agenda Reforma Agraria juga harus dapat menyentuh aspek regulation reform, dimana land reform ialah perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, access reform berupa pendampingan dan pembinaan pasca redistribusi tanah pada akses yang lebih luas seperti sarana dan prasarana pertanian, pengairan jalan, usaha tani, pemasaran produksi, koperasi usaha tani, dan perbankan,

		<p>agenda Reforma agraria selanjutnya adalah terciptanya pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.</p> <p>Ilham berpendapat bahwa gerakan reforma agraria merupakan gerakan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitannya dengan tanah, access reform merupakan pemberian kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Access reform yang dimaksud ialah penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di kelurahannya.</p>
2.	Nama Peneliti	Saheriyanto
	Tahun Penelitian	2016
	Judul & Lokasi Penelitian	Peningkatan <i>Access Reform</i> Pelayanan Sertifikasi Tanah Sebagai Modal Usaha Di Pasar Kelurahan Melalui Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Banjar
	Metode Penelitian	Penelitian hukum yuridis empiris, kualitatif - deskriptif analitis
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud pelayanan pendaftaran tanah “Tatamu Pade”? 2. Bagaimana tahapan pelaksanaan pelayanan “Tatamu Pade”?

		<p>3. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan “Tatamu Pade”?</p> <p>4. Bagaimana dampak pendaftaran tanah terhadap akses modal usaha masyarakat di pasar kelurahan Kabupaten Banjar?</p>
	<p>Hasil/Kesimpulan</p>	<p>Layanan Tatamu Pade merupakan salah satu inovasi layanan pertanahan berupa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan pelaku ekonomi produktif di pasar kelurahan.</p> <p>Tahapan pelaksanaan terdiri dari pra sertifikasi, sertifikasi dan pasca sertifikasi. Pra sertifikasi dilakukan penjaringan calon penerima KUR oleh BRI Cabang Martapura. Tahapan sertifikasi mengikuti tahapan kegiatan PRONA. Kegiatan pasca sertifikasi tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berperan dalam bentuk fasilitas dan pendampingan ke akses permodalannya yang dilaksanakan oleh BRI wilayah kerja Kab. Banjar dalam rangka peningkatan modal usaha dan penguatan ekonomi riil di pekelurahan.</p> <p>Kendala: beberapa lahan masuk kawasan hutan, beberapa kelurahan pelosok mengalami kesulitan akses informasi</p>

		<p>sertipikasi tanah sehingga ada tetangga yang berbatasan dengan objek sertifikasi tidak dapat hadir. Solusi: mengajukan permohonan pelepasan fungsi kawasan hutan; membuat BA, dan kerjasama perangkat pemerintah kelurahan dengan kantor pertanahan untuk melengkapi surat-surat kepemilikan tanah.</p> <p>Hasil penelitian terbukti sebanyak 2883 bidang tanah (realisasi 100% Prona 2016), dapat menjaring 180 bidang tanah untuk modal usaha bagi masyarakat kelurahan KUR BRI sebesar Rp 6.286. 700.000</p>
3.	Nama Peneliti	Muhammad Luthfi Rohman
	Tahun Penelitian	2018
	Judul & Lokasi Penelitian	<i>Access Reform</i> Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Kelurahan Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
	Metode Penelitian	Kualitatif pendekatan studi kasus
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan akses reform di Kelurahan Tahunan? 2. Apa faktor penghambat dan pendukung akses reform di kelurahan Tahunan?
	Hasil/Kesimpulan	Pelaksanaan Acces Reform di Kelurahan Tahunan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan peneliti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori Access Reform, Pemberdayaan Masyarakat dan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset dengan hasil temuan lapangan.

		<p>komponen-komponen yang ada dalam tahapan program tidak dilakukan dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan access reform di kelurahan Tahunan belum berhasil memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh UKM, dan belum bisa melindungi posisi UKM yang masih lemah dari persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi dari yang kuat.</p> <p>Faktor kegagalan Access Reform disebabkan karena beberapa faktor; Tidak maksimalnya peran dari Kantor Pertanahan Jepara, tidak adanya kordinasi yang baik antar aktor, Keterbatasan Anggaran dan waktu, akselerasi lembaga keuangan diluar mitra program, minimnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya akses informasi, dan profesionalitas pelaku pemberdayaan.</p>
4.	Nama Peneliti	Agung Dini Riyadi
	Tahun Penelitian	2020
	Judul & Lokasi Penelitian	Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di kelurahan Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
	Metode Penelitian	Metode Kualitatif Deskriptif
	Permasalahan Penelitian	Bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca dilakukan redistribusi tanah di kelurahan Sumogawe?
	Hasil/Kesimpulan	Penelitian dilakukan dengan cara partisipatif aktif terhadap masyarakat yang mempunyai usaha susu sapi perah. Kantor Pertanahan

		<p>Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sumogawe. Pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah meliputi kegiatan Penyuluhan dan pendampingan usaha dari dinas-dinas terkait di Pemda, serta pemberian akses permodalan dari Bank BRI melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya pemberdayaan masyarakat</p>
5.	Nama Peneliti	Mohammad Nur Septiady Masloman
	Tahun Penelitian	2022
	Judul & Lokasi Penelitian	”Perumusan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan dan Analisis Ekonominya Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Studi Kasus di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
	Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif
	Permasalahan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria yang dapat dibuat untuk pembangunan dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi wilayah kelurahan di Kelurahan ploso. 2. Memperkirakan dampak pelaksanaan rencana aksi penataan akses reforma agraria dimaksud terhadap pendapatan

		<p>dan kesejahteraan masyarakat kelurahan plosa.</p> <p>3. Meninventarisasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi akses reform di Kelurahan plosa dan menyusun rumusan solusi penyelesaian faktor penghambat dimaksud.</p>
--	--	--

Berdasarkan hasil perbandingan antara beberapa hal tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam hal:

- a. Lokasi penelitian;
- b. Tujuan penelitian ini lebih komprehensif daripada penelitian sebelumnya;
- c. penelitian ini mengangkat perumusan rencana aksi penataan akses reforma agraria berbasis potensi kelurahan yang lebih luas cakupan kajiannya dibandingkan penelitian sebelumnya;
- d. dalam penelitian ini dikumpulkan data tentang potensi fisik dan non-fisik wilayah kelurahan yang menggambarkan variabel sangat penting dalam merancang ragam usaha yang dapat dibuat dan dikembangkan dalam rangka penataan akses yang tidak dikaji dalam penelitian lainnya;
- e. penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang diduga berkemungkinan menghambat dan pendorong terlaksanannya rencana aksi yang dirumuskan serta upaya solusinya yang tidak dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan Tabel 1 dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rencana penelitian ini dengan penelitian-penelitian serupa sebelumnya. Oleh karena itu peneliti

berkeyakinan bahwa penelitian ini akan menghasilkan temuan informasi yang bermanfaat.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kelurahan Ploso memiliki beragam potensi yang dapat di kembangkan baik itu potensi fisik maupun non fisik untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Potensi fisik di Kelurahan Ploso antara lain, (1) Jenis tanah, (2) jenis penggunaan tanah, (3) kelas lereng lahan, (4) kondisi hydrologi, dan (5) iklim sedangkan untuk potensi non fisik berupa (1) pertanian (sawah dan tegelan), (2) pariwisata, (3) peternakan, dan (4) pemerintahan. Potensi-potensi yang ada tersebut secara keseluruhan memang belum dikelola dan dikembangkan dengan baik karena kurangnya pendampingan dari dinas terkait. Potensi yang paling menonjol dan menjadi andalan di Kelurahan Ploso ini adalah potensi wisata pantai dan pertaniannya berupa sawah dan tegelan yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat luas dengan mensinergikan sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara baik sehingga menghasilkan kualitas yang maksimal dengan dukungan dari pemerintah daerah.
2. Perkiraan dampak rencana aksi yang dilaksanakan di Kelurahan Ploso yang meliputi sektor pertanian, Tegelan/ladang, pariwisata dan peternakan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal pendapatannya dengan pengembangan jenis usaha yang ada dan usaha lain yang akan dikembangkan.
3. Dalam pengembangan potensi yang ada di Kelurahan Ploso ini sendiri memiliki beragam faktor penghambat dan faktor pendorong yang dijumpai dilapangan. Faktor penghambat antara lain komunikasi, kondisi geografis, sumber daya manusia, iklim dan juga permodalan sedangkan faktor pendorongnya antara lain sumber daya alam, lokasi, akses jalan dan juga kondisi hydrologi.

Diantara faktor penghambat tersebut yang kemudian dirumuskan beberapa tahapan solusi yang kiranya dapat membantu untuk menyelesaikan kendala tersebut yang dimulai dari tahap sosialisasi, partisipasi, pendampingan serta pemberian akses modal yang nantinya juga di harapkan dapat mendorong terwujudnya perekonomian daerah yang sejahtera berdasarkan pengembangan potensi wilayah kelurahan/kelurahan.

B. Saran/Usulan Kebijakan

Dalam membangun Kelurahan yang maju dan mandiri maka diperlukan sinergitas antara pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah daerah dan juga masyarakatnya agar arah dan tujuan dari pembangunan itu sendiri menjadi lebih baik dan terarah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harusnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada agar ketika pelaksanaannya tidak mengalami kendala.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi instansi

Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini dinas-dinas terkait harusnya lebih memberikan dorongan atau suport kepada masyarakat Kelurahan Ploso agar lebih termotivasi lagi dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada baik itu berupa sosialisasi ataupun pendampingan secara langsung agar kebijakan-kebijakan yang nantinya telah dibuat dapat terlaksana dengan baik.

b. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat Kelurahan Ploso dan masyarakat sekitar harus meningkatkan partisipasinya dalam mengembangkan potensi yang ada baik itu pertanian, peternakan, pariwisata, ataupun tegelan agar ekonomi menjadi lebih meningkat.

c. Bagi STPN

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembahasan terkait penyusunan rencana aksi berbasis reforma agraria dalam upaya pengembangan potensi

Kelurahan yang ada terutama terkait strategi ataupun kebijakan apa yang nantinya diperlukan untuk keberhasilan program tersebut.

d. Bagi peneliti

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan mampu mempraktekan didaerah asalnya agar potensi-potensi yang ada di Kelurahan/Kelurahan kelak bisa di kembangkan dengan lebih maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I 2010, *Berpihak pada manusia: paradigma nasional pembangunan Indonesia baru*, TICI Publications, Yogyakarta
- Aca, Sugandhy Dan Hakim Rustam 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustini, MYDH 2018, *Pembuatan keputusan berdasar teori ekonomi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2017*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2018*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2020, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2020*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2021, *Kecamatan Pacitan Dalam Angka 2021*, katalog no. 1102001.3312150, BPS, Jakarta
- Badan Pusat Statistik 2020, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020
- Endah, K 2020, 'Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi kelurahan', *Jurnal Moderat*, vol. 6, no. 1, hlm 135-143.
- Fahrudin dan Kusnadi, tt, 'Analisis potensi ekonomi kelurahan dan prospek pengembangannya', 2019, dilihat pada 14 April 2022, <https://ejournal.unuja.ac.id>.
- Graha, AN 2009, 'Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi', *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, vol. 5, no. 2, hlm 117-126.

Jordan, AD 2020, 'Mekanisme hubungan permintaan dalam mempengaruhi pasar', *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* hlm. 1-17, dilihat pada 20 April 2022, <http://eprints.umsida.ac.id>

Kartasapoetra, A.G 1988, *Pengantar ekonomi produksi pertanian*, Bina aksara, Jakarta.

Kementerian PPN/Bappenas , *The economic, social, and environmental benefits of a circular economy in Indonesia 2021*, Jakarta

Kemkominfo, *pertumbuhan e-commerce Indonesia capai 78 persen*, 2019 dilihat pada 11 April 2022, <https://kominfo.go.id/>

Londa,VY dkk 2014, 'Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan di Kelurahan Lolah Ii Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol.1, no.1

Maladi, Y 2013, 'Reforma agraria berparadigma pancasila dalam penataan kembali politik agraria Nasional', *MIMBAR HUKUM*, vol. 25, no. 1, hlm 27-41.

Modjo, MI 2020, 'Memetakan jalan penguatan ekonomi pasca pandemi', *The Indonesian Journal of Development Planning*, vol. IV no. 2, hlm. 103-116.

Nurdin I. 2017. 'Mewujudkan Kelurahan Maju Reforma Agraia'. *Jurnal Bhumi*. vol. 3 no. 1, hlm 83-97.

Parlindungan, A.P 1989, *Bunga rampai hukum agraria serta landreform bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan fokus peningkatan kompetensi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria

Rahim. Abd. Dan Hastuti. DRW. 2007. *Ekonomi Pertanian*. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Rahman, A 2018, 'Identifikasi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat', *Jurnal Manajemen Pembangunan*, vol. 5, no. 1, hlm 17-36.

Riyadi, AD, M. Nazir Salim, & Mujiati 2020 'Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Kelurahan Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang', *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.

Rustia, HN 2012, 'Mengukur kesejahteraan', review terhadap *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*, oleh Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittoussi, penerj. Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur, Penerbit Marjin Kiri 2011, jurnal.dpr.go.id diakses pada 16 April 2022.

Saputra, D 2021, 'Survei BI: 87,5 persen UMKM Indonesia terdampak pandemi covid-19', *Bisnis.com*, 19 Maret 2021 dilihat pada 10 April 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/>

Saputra, N dkk 2020, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, vol. 11, no.1

Sinaga, H 2020, '60 tahun UU Pokok Agraria', *Hukum Online blog*, web diposting pada 24 September 2020, dilihat pada 20 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/60-tahun-uu-pokok-agraria-1t5f6bff776bd30>

Sudarman, A 2004, *Teori ekonomi mikro*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta

Soekartawi. 2006. *Analisis usaha tani*. Jakarta: UI Press

Sugiyono 2015, *Metode penelitian tindakan komprehensif*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Sukirno, Sadono, 2000. Makro Ekonomika Modern, PT. Rasa Grafindo Persada:Jakarta

Sutiono, dkk 2014, 'Analisis kelayakan finansial usaha budidaya bambu', *Jurnal Ilmu Kehutanan*, vol. 8, no.1, hlm 14-24

Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Tumanggor, DS 2009, 'Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi coklat di Kabupaten Dairi', Tesis pada Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan

Wibowo, AA & Muhammad Faris Alfarisy 2020, 'Analisis potensi ekonomi kelurahan dan prospek pengembangannya', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, vol. 22, no. 2, hlm 204-218.

Wiradi, G 2009, *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria*, STPN Press, Yogyakarta